

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Puskesmas Pemancungan dan Puskesmas Pauh, maka penulis menyimpulkan :

6.1.1 Komponen Input

Kebijakan pemantauan tumbuh kembang balita disebutkan dalam Permenkes no 6 tahun 2024 tentang SPM. Kebijakan diturunkan dalam program puskesmas dalam bentuk penimbangan berat badan balita minimal delapan kali dalam satu tahun, pengukuran tinggi badan balita minimal dua kali dalam satu tahun, pemberian Vitamin A dua kali dalam satu tahun, dan pemantauan perkembangan balita dua kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya di posyandu oleh bidan dan kader. Perwako khusus mengenai pemantauan tumbuh kembang balita di kota Padang belum ada. Kebijakan daerah melalui perwako dapat menjadi landasan pendukung bagi dinas kesehatan kota untuk penyediaan SDM, dana, sarana dan prasarana. Puskesmas Pemancungan memiliki keterbatasan dalam sarana. Sedangkan, Puskesmas Pauh memiliki ketersediaan sarana namun tidak dibawa oleh petugas saat posyandu.

6.1.2 Komponen Proses

Puskesmas Pemancungan dan Puskesmas Pauh memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita yaitu tidak sesuai standar, sistem pencatatan dan pelaporan yang masih perlu pengawasan agar mendapatkan data yang valid. Perbedaan terlihat dari keaktifan kader posyandu dari Puskesmas

pemancungan untuk melakukan sweeping balita yang tidak datang posyandu sebagai upaya peningkatan cakupan kunjungan posyandu.

6.1.3 Komponen Output

Kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh kedua Puskesmas tetap menunjukkan pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita belum berjalan optimal. Hal ini dapat menjadi catatan bagi puskesmas dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pencatatan dan pelaporan bagi kedua Puskesmas sehingga monitoring dan evaluasi oleh pimpinan diperlukan sebagai bentuk pengawasan dalam implementasi kebijakan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas makan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

Membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian pemantauan tumbuh kembang balita dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan advokasi ke walikota untuk merancang perwako khusus mengenai pemantauan tumbuh kembang balita. Hal ini akan mendukung dinas kesehatan dalam pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi petugas, dan peningkatan supervisi dalam monitoring pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang.

6.2.2 Bagi Instansi Puskesmas

Penyusunan perencanaan sesuai kebutuhan wilayah dengan pedoman manajemen puskesmas, seperti kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana. Puskesmas perlu memperbaiki pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita sesuai dengan SOP agar pelayanan sesuai standar. Sosialisasi berkala SOP kepada petugas dan evaluasi pelaksanaan SOP oleh tim mutu puskesmas. Melakukan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu.

Tenaga kesehatan disarankan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap SOP dan koordinasi kepada pihak terkait dalam pemantauan tumbuh kembang balita. Tenaga kesehatan perlu melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun pembelajaran mandiri untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar.

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan perlu mendorong dan memfasilitasi penelitian kebijakan terkait evaluasi program kesehatan nasional dengan menggunakan analisis input, proses, dan output. Institusi pendidikan disarankan mengintegrasikan pembelajaran kebijakan kesehatan dengan implementasi di lapangan, sehingga mahasiswa memahami kesenjangan antara regulasi dan praktik pelayanan.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda seperti kuantitatif maupun *mixed method* untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita di puskesmas.